

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS  
PUBLIK ( SAK - ETAP ) PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI KP – RI MARDI**

**MULYO SIDOARJO**

**Dosen Pembimbing :**

**Agus Subandoro, SE.,MM**

**Abdul Hamid,SE.,MM,Ak. ACPA, CTA**

**Nama : Jamiyatul Nufa**

**STIE MAHARDHIKA SUARABAYA**

**ABSTRAK**

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menangani kesejahteraan penduduk agar kemiskinan yang terjadi di setiap wilayah di daerah Indonesia dapat teratasi dan tercapai. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan mendirikan Koperasi di setiap daerah. Karena koperasi bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya koperasi haruslah profesional sehingga tujuan kerja yang efektif, efisien, kelayakan usaha tetap harus dipenuhi. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggung jawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian koperasi, yaitu pengembangan sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan ( SAK ) Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo .Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk angka - angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil observasi mengenai laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo Peneliti ini bertujuan menganalisis dan mengetahui Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo termasuk atau tidak dalam entitas tanpa akuntabilitas publik serta mengetahui penerapan penyajian laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo di tinjau berdasarkan SAK ETAP. Hasil penelitian ini Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik karena Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo tidak memiliki akuntabilitas signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, dalam hal ini pengguna eksternal adalah anggota koperasi yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan pemerintah , laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) karena tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari : Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan

**Kata Kunci : SAK ETAP dan Laporan Keuangan**

## ABSTRACT

Efforts to improve the welfare of the community, there needs to be cooperation between the government and all levels of society in dealing with the welfare of the population so that poverty that occurs in each region in Indonesia can be overcome and achieved. One of the government's efforts to improve the welfare of the community is by establishing cooperatives in each region. Because cooperatives aim to fight for the improvement of community economic prosperity based on family principles. However, in carrying out its business activities, cooperatives must be professional so that effective, efficient work arrangements must still be met. Professional management requires a good accountability system and relevant and reliable information for decision making, planning and controlling cooperatives, namely the development of information systems needed to grow cooperatives through accounting, especially formulating financial accounting standards (SAK) The writing of this thesis aims to determine the preparation of financial statements Koperasi KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo. As for this type of research using qualitative research. Qualitative research is data that is not in the form of numbers or can not be calculated, and is obtained from observations regarding the financial statements of the Indonesian Cooperative Mardi Mulyo KP - KP Sidoarjo. This research aims to analyze and find out the Mardi Mulyo Sidoarjo KP-RI Cooperative including or not in entities without public accountability and knowing the application of the presentation of financial statements Koperasi KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo reviewed based on SAK ETAP. The results of this research Koperasi KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo is an entity without public accountability because K-RI Cooperative Mardi Mulyo Sidoarjo does not have significant accountability and publishes financial statements for general purposes for external users, in this case external users are cooperative members who are not directly involved in business management, creditors and government, the financial statements of the Indonesian Cooperative KP Mardi Mulyo Sidoarjo are not in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK ETAP) because they do not present a complete financial report consisting of: Balance Sheet, Income Statement, Reports Changes in Equity, Cash Flow Statements, Notes to Financial Statements

**Keywords: SAK ETAP and Financial Statement**

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh masyarakat maupun anggota koperasi. Di dunia koperasi juga harus memiliki suatu keunggulan bersaing agar dapat bertahan dan meraih keuntungan usaha, kemampuan bersaing tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen entitas yang bersangkutan. Kinerja suatu entitas sangat tergantung pada

bagaimana manajemen mengelola keuangan dan melaksanakan aktivitas entitas tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen pun dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan profesionalismenya, yang bertujuan agar manajemen entitas mampu mencapai tujuan – tujuan entitas telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan entitas, pihak manajemen harus memperhatikan kinerja keuangan entitas yang

menggambarkan kondisi keuangan dan perkembangan entitas dalam mencapai tingkat keberuntungan.

Koperasi yang diharapkan dapat menjadi tonggak utama perekonomian Indonesia mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya misalnya kekurangan dana untuk operasional koperasi. Kurangnya kemampuan pelaku

yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja mereka ( Khafid 2012 ). Oleh karena itu, agar koperasi bisa berkembang dan menjadi seperti yang diharapkan, koperasi harus berpedoman pada suatu standar yang dibuat untuk mengatur pengelolaan koperasi itu sendiri, sehingga dalam pengelolaannya, manajemen koperasi memiliki tuntunan agar dapat menjadikan koperasi tersebut menjadi lebih baik. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( ETAP ), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statement ) bagi pengguna eksternal.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ). merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis ; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP ; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun ( <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap> ).

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas

koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi, selain itu rendahnya pendidikan serta kurangnya pengalaman dalam bidang akuntansi menjadi kendala yang harus dihadapi oleh koperasi. Sebagai sebuah lembaga ekonomi, yang nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan, koperasi sudah dipastikan akan berhubungan dengan berbagai pihak

Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK - ETAP 2018 : 3 ) menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermangfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen *stewardship* atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyusunan laporan keuangan yang merupakan tahapan awal dari penerapan akuntansi akan menghasilkan informasi yang mempunyai penerapan penting, baik untuk menyusun perencanaan keuangan, pengendalian, maupun untuk mengambil keputusan keuangan .

## TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, 3 bulan , 6 bulan atau tahunan. Biasanya periode laporan keuangan adalah 1 tahun.

Laporan keuangan koperasi sebagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak – pihak tertentu baik intern maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota,

pengurus, pengawas, gerakan koperasi, auditor dan sebagainya.

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( PSAK ETAP ) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria, yaitu : tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( *general purpose financial statements* ) bagi pengguna eksternal. kriteria ETAP tersebut, bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas public, yaitu jika Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK – ETAP ) jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan pengguna Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK – ETAP ). Penerbitan PSAK ETAP oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan ( DSAK ) Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI ) ini sebagai alternative PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana di dibandingkan dengan PSAK umum yang leboh rumit. Pada tanggal 1 Januari 2011 nanti, setiap entitas diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum atau PSAK ETAP. Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik, maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, maka entitas dapat memilih menerapkan PSAK ETAP atau PSAK umum.

Menurut kebijakan yang diterbitkan yang diterbitkan oleh DSAK IAI, pada tanggal 1 januari 2011, suatu entitas publik, dapat memilih untuk menerapkan PSAK ETAP atau PSAK umum. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas public pada menetapkan penggunaan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011

tidak boleh merevisi kebijakan akuntasinya dengan menggunakan PSAK ETAP. Oleh karena itu adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke PSAK ETAP itu, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategi bagi pengambilan keputusan PSAK mana yang akan dipakai

Adapun Standart Akuntansi Keuangan ( Tahun 2012 dan 2015 ) Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas, bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang mengenai posisi keuangan , kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Standar Akuntansi Keuangan ( tahun 2012 dan 2015 ) memberikan pengertian tentang laporan keuangan yaitu, Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa “Laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan perubahan posisi keuangan (misalnya : laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh SAK ETAP bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang suatu kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka

dalam satuan moneter. Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana menurut Prof. Dr. Sugiyono ( 2016 : 07 ) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, ( sebagai lawannya adalah eksperimen ) dimana peneliti sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi ( gabungan ) analisis data bersifat induktif / kualitatif

### **Sumber dan Pengumpulan Data**

Pada tahap ini data - data diperoleh berasal dari data :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Disini data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara kepada Penagwas Koperasi ,Sekertaris Koperasi, dan dokumentasi terhadap koperasi sebagai obyek penulisan dalam penelitian skripsi ini.

#### **b. Data skunder**

Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Disini data

skunder yang diperoleh melalui buku - buku, literatur, dan karya ilmiah

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Sejarah Koperasi KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo**

Koperasi KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo merupakan entitas atau badan bergerak dalam bidang koperasi serba usaha yang mempunyai tujuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Undang - Undang Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Dalam aturan Koperasi KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo secara umum yang diatur dalam pasal Undang - Undang pengenaan orientasi profit atau laba sebagai produktifitas dari kinerja koperasi. Dalam Undang - undang No. 25 tahun 1992 Bab IX Pasal 45, SHU adalah pendapatan yang didapatkan atau diperoleh koperasi dalam satu tahun buku yang dikurangi biaya, penyusutan, kewajiban, serta pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) adalah sebuah keuntungan usaha yang dibagi menurut aktifitas ekonomi anggota koperasi, bisa tarik kesimpulan bahwa, setiap anggota koperasi akan mendapatkan hasil Sisa Hasil Usaha ( SHU ) yang berbeda - beda. Hal demikian terjadi karena koperasi melihat dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam hal ini pengelola koperasi perlu melakukan penentuan proporsi Sisa Hasil Usaha ( SHU) untuk jasa modal beserta jasa transaksi usaha yang kemudian nanti akan dibagikan kepada seluruh anggota koperasi. Untuk

itu pengelola koperasi beserta anggota harus menentukan persentase profit dari koperasi.

KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo berdiri dan berbadan hukum mulai tanggal 26 maret 1986 dengan tujuan untuk membantu para pegawai balai pelayanan dan rehabilitas sosial penyandang msalah kesejahteraan sosail ( Balai Yanrehsos – PMKS ) Sidoarjo, UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita ( PSAB ) sidoarjo dan pensiunan ( Purna Tugas ) dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari baik masalah keuangan maupun kebutuhan lainnya, nampaknya perkembangan KP - RI dilingkungan Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Balai Yanrehsos – PMKS ) Sidoarjo ini mengalami pasang surut dalam usahannya

Dengan semangat kebersamaan para anggota dan juga didukung penuh oleh Pembina / pelindung yaitu kepala.Balai Pelayanan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Balai Yanrehsos – PMKS ) Sidoarjo, maka usaha KP - RI Mardi Mulyo Sidoarjo dapat berjalan dan setiap tahun wajib menjalankan amanah yang tertuang AD / ART Koperasi yaitu dengan mengadakan Rapat anggota tahunan yang merupakan salah satu pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada para anggotannya.

### **Hasil Penelitian**

Dalam standar akuntansi yang mengacu pada SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap meliputi : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan keuangan yang berisi mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam dalam laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo yang disajikan

yaitu : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Sisa Hasil Usaha

Dikarenakan laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi.Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan dan kondisi perusahaan, juga dapat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan - kebijakan di tahun mendatang.

Dalam penyusunan laporan keuangan tentu terdapat standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai dasar agar seluruh laporan keuangan sama dan dapat dimengerti. Adapun dasar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi adalah PSAK No. 27 tapi pada PPSAK No. 8 tentang pencabutan PSAK No. 27 dan diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau yang disebut dengan SAK ETAP, yang bawha laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo**

Pada penyusunan laporan keuangan yang ada di Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo dalam penyampaian laporan - laporan yang menggunakan sistim akuntansi sederhana, walaupun demikian setiap transaksi diupayakan untuk dicatat secara tepat wakyu dan didukung dengan bukti bukti pemasukan / pengeluaran yang syah dan lengkap. Yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) yang mencakup 5 Komponen, meliputi :

#### **1. Neraca**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) Laporan Neraca menyajikan Aseet, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu pada akhir periode

pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Property investasi
- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Utang usaha dan utang lainnya
- h. Aset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban pajak
- j. Ekuitas

Entitas menyajikan pos, judul dan subjumlah dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika :

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan.
- c. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- d. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar, jika siklus operasi minimal entitas tidak dapat

didenifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika :

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan.
- c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau.
- d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) tidak menentukan format atau urutan terhadap pos – pos yang akan disajikan, hanya menyediakan daftar pos – pos yang berbeda-beda sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca, sebagai tambahan :

- a. Pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos – pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas, dan
- b. Uraian yang digunakan dan urutan pos – pos atau agregasi terhadap pos – pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas.

Pertimbangan atas pos – pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian :

- a. Sifat dan likuiditas aset
- b. Fungsi aset dalam entitas.

c. Jumlah, sifat dan waktu kewajiban.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) entitas mengungkapkan di neraca, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan :

- a. Kelompok aset tetap.
- b. Jumlah piutang usaha, piutang dari pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya.
- c. Persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari :
  1. Persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
  2. Persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut.
  3. Bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian barang jasa.
- d. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban dietamasi lainnya.
- e. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba dan pendapatan dan beban yang diakui langsung ekuitas.

Entitas selain berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan perubahan selama periode untuk setiap kategori ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan untuk setiap kategori ekuitas.

2. Laporan laba rugi

Menurut SAK ETAP mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Mengatur informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :

- a. Laba atau rugi untuk periode
  - b. Pendapatan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
  - c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui.
  - d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah
4. Laporan Arus Kas

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklarifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

a. Arus kas aktivitas operasi adalah :

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
2. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lainnya
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
4. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
5. Pembayaran kas atau resitansi pajak penghasilan
6. Penerimaan dan pembayaran investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya. Yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

b. Arus kas aktivitas investasi adalah :

1. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya
2. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya

3. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dari joint venture.
  4. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture.
  5. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
  6. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
- c. Arus kas aktivitas pendanaan
1. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas
  2. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas
  3. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya
  4. Pelunasan pinjaman
  5. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan harus :
- a. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan
  - b. mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
  - c. memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

## Pembahasan.

## Penerapan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. Namun entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP jika dampaknya tidak material.

Jika SAK ETAP tidak secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, maka manajemen harus menggunakan pertimbangan (*judgement*) untuk mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang :

- a. Relevan bagi para pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi
- b. Andal yaitu dalam laporan keuangan yang :
  1. menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas
  2. mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya, serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumnya
  3. netral yaitu bebas dari bias
  4. mencerminkan kehati-hatian, dan
  5. bersifat lengkap dalam semua hal yang material.

Namun entitas harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya. Kecuali SAK ETAP secara spesifik mensyaratkan atau mengizinkan kategorisasi pos - pos sehingga kebijakan akuntansi yang berbeda adalah sesuai, jika SAK ETAP mensyaratkan atau mengizinkan kategorisasi tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang sesuai dipilih dan diterapkan

secara konsisten untuk setiap kategori. Entitas harus mengubah kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut diisyaratkan berubah sesuai SAK ETAP, atau akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pencatatan transaksi yang terjadi pada Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo bahwa penyajian laporan keuangan sudah disajikan dalam bentuk laporan keuangan koperasi. Dimana laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mengetahui keadaan dan kondisi koperasi juga sebagai dasar kebijakan koperasi di masa mendatang. Laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) karena tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal , Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan

### **SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo, antara lain :

1. Dalam Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo harus melakukan pencatatan dan menyusun serta menyajikan laporan keuangannya, dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK - ETAP ) sepenuhnya.
2. Perlu adanya struktur organisasi serta masa kepengurusan yang berjalan / masa bakti berjalan.

3. Perlu adanya data perkembangan koperasi baik bidang organisasi, modal maupun usahanya.
4. Perlu kepengurusan periode masa bakti 2017 sampai dengan 2019 agar lebih kompak dan solid dalam menjalankan usaha koperasi.
5. Peran Pembina / pelindung Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo sangat dibutuhkan dalam memberikan wawasan tentang perkoperasian agar anggota tidak mudah untuk memutuskan keluar dari keanggotaan koperasi karena masalah yang tidak prinsip.
6. Perlu diadakan Audit KAP untuk laporan keuangan. Koperasi KP – RI Mardi Mulyo Sidoarjo.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arens Boy Pratama 2015, Analisis Perlakuan Akuntansi Perkoperasian Berdasarkan SAK – ETAP Koperasi Karya Sejahtera Karyawan Karyawati PT. Peln Cabang Surabaya.
- Anggun Sabela , 2016, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) Tirta Sari ( SAK ETAP Implementation In The Financial Statement On Cooperative Tirta Sari )
- Aghamukti Kusumandaru, 2018, Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK – ETAP ( Studi Kasus Di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( PKP RI ) Kabupaten Wonogiri
- Baswir, Revrison, 2013, Koperasi Indonesia, BPFE, Yogyakarta..
- DR. Subandi, M.M. 2013 Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik, tujuan koperasi, prinsip koperasi, alfabeta, Bandung

- Dwi Martani, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya Sylvia, 2016, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2 Buku 1, Salemba empat, Jakarta.
- (<http://santyaaminah.wordpress.com>), Ciri - ciri koperasi
- Farid Wajdi, Rinto Syahdan 2013 Dasar – dasar Akuntansi Kaliwangi, Yogyakarta.
- Hendar, 2013, Manajemen Perusahaan Koperasi, Modal pernyataan Erlangga, Jakarta
- Herdiansyah, Haris, 2012, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, - cetakan ketiga -, Salemba Humanika, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI ) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) Berdiri Sendiri  
(<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap> )
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018, Tujuan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam artikel 2013 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik , Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) telah menerbitkan ( SAK ETAP ) pada tanggal 12 juli 2009 dan berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2011, Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan akuntansi indonesia IAI, 2018 laporan keuangan lengkap pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK - ETAP ).
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015, pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per efektif 1 Januari 2015, Salemba Empat, Jakarta
- K.R Subramanyam, John J. Wild, 2010, Analsis laporan keuangan financial statement analysis, salemba empat, Jakarta
- K.R Subramanyam, John J. Wild, 2010, Analsis laporan keuangan financial statement analysis, salemba empat, Jakarta.
- Riahi, Ahmed, Belkauwoi, 2011, Teori Akuntansi, Edisi 5 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Erlangga, Jakarta.
- Revrisond Baswir, 2013 Tujuan koperasi Rineka cipta, Yogyakarta
- Sofyan Syafri Harapan, 2012, Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011, Rajawali Pres, Jakarta
- Tuti Trisnawani, 2011 Akuntansi untuk Koperasi dan UKM, salemba empat Jakarta.
- Sutrimo Suwasono 2017 , Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Sumber Agung Jombang
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitain Kuantitatif, Kualitatif, Affabeta Bandung

<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pajak-shu-koperasi/>

Pasal 1 PMK  
Nomor111/PMK.03/2010 tentang  
perhitungan pajak SHU 10%